

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik politik berarti pertentangan kepentingan politik untuk memperoleh kekuasaan politik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan definisi konflik politik dari Ramlan Surbakti yang mendefinisikan konflik politik sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

Peneliti mempergunakan teori faktor penyebab konflik dari Simon Fisher, hasil dari temuan peneliti menyimpulkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik politik dalam kepemimpinan DPD Hanura Sumatera Barat. Pertama, adanya rasa ketidakpercayaan pengurus DPD Hanura Sumatera Barat terhadap ketua umum Oesman Sapta Odang. Kedua, adanya rasa kekecewaan ketua DPD Hanura Wiranto yang tidak mampu mengambil sikap yang bijak dalam konflik yang terjadi di kepemimpinan Hanura. Ketiga, kurangnya rasa saling menghargai antara tokoh senior dan junior Hanura di Sumatera Barat.

Keempat, Perbedaan pandangan dalam pengelolaan Partai antara kubu Oesman Sapta Odang dengan kubu Sarifuddin Sudding. Kelima, masuknya gerbong Anas Urbaningrum melalui Perhimpunan Pergerakan Indonesia dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kepemimpinan Hanura baik di tingkat DPP maupun di tingkat DPD.

Peneliti juga menganalisis implikasi dari konflik politik yang terjadi di DPD Hanura Sumatera Barat dan menemukan beberapa dampak yaitu pertama,

dipecatnya 10 anggota DPRD dengan rincian satu orang anggota DPRD provinsi dan 9 orang anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, rusaknya hubungan sosial sesama pengurus DPD Hanura Sumbar. Ketiga adanya pembaharuan dalam struktur kepengurusan partai sampai ke tingkat anak ranting.

Keempat, adanya terobosan dalam hal kaderisasi dalam kepartaian Hanura dengan dijalankannya latihan kader pratama. Konflik politik yang terjadi dalam Partai Hanura termasuk dalam bentuk konflik positif karena tidak mengancam eksistensi sistem politik karena dapat diselesaikan lewat pengadilan pemerintah. Walaupun dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham sangat kental unsur politiknya.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi pada kepengurusan DPD Hanura Sumatera Barat disebabkan oleh benturan kepentingan sumber kewenangan antara pihak Marzul Veri yang mendapatkan dukungan dari Oesman Sapta Odang dengan kubu Muslim Harun yang mendapat dukungan dari Daryatmo. Konflik semakin diperuncing dengan ego senioritas Marlis dan Muslim Harun memandang Marzul Veri sebagai tokoh muda yang belum berpengalaman dalam dunia kepartaian. Konflik ini tentu berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap Partai Hanura terutama pengurus DPD Hanura Sumbar.

B. Saran

Temuan-temuan yang dipaparkan peneliti merupakan bukti bagaimana kondisi dan pengelolaan partai saat ini. Partai Hanura sebagai salah satu partai nasionalis harusnya mulai berbenah dalam hal pengelolaan organisasi. Maka

peneliti akan memberikan beberapa rekomendasi baik untuk Parpol secara umum maupun Partai Hanura secara terkusus

1. Partai Politik (Parpol)

- a. Parpol harusnya kembali memperkuat basis ideologinya dengan menjalankan agenda kaderisasi.
- b. Parpol harus memiliki mahkamah konstitusi partai sebagai lembaga yang akan menyelesaikan konflik internal partai.
- c. Parpol harusnya membuka ruang dialektika untuk mendapatkan terobosan dalam menjawab tantangan zaman.
- d. Kepemimpinan partai tidak lagi bersifat oligarki

2. Kementerian Politik Hukum dan Keamanan

- a. Kemenkumham harusnya bisa bersikap netral dalam mengeluarkan suatu keputusan
- b. Kemenkumham hendaknya dapat meninjau secara seksama terkait suatu keputusan yang akan dikeluarkan

3. Pengadilan Tata Usaha Negara

- a. PTUN harus mampu bersikap tegas dan adil terhadap konflik yang terjadi dalam suatu organisasi.
- b. Setiap keputusan yang dikeluarkan PTUN harus ditinjau kembali karna akan sangat berdampak pada hajat hidup orang banyak.

